

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tingginya populasi manusia pada saat ini memberikan dampak terhadap perubahan kondisi lingkungan hidup, hal ini didasari dari adanya eksploitasi sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan masyarakat tentunya dapat dipenuhi oleh lingkungannya, sehingga dampak terbesar dari faktor kependudukan ini yaitu kerusakan lingkungan (Yunianto, 2021). Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia salah satunya yang diakibatkan oleh sampah yang dihasilkan melalui aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

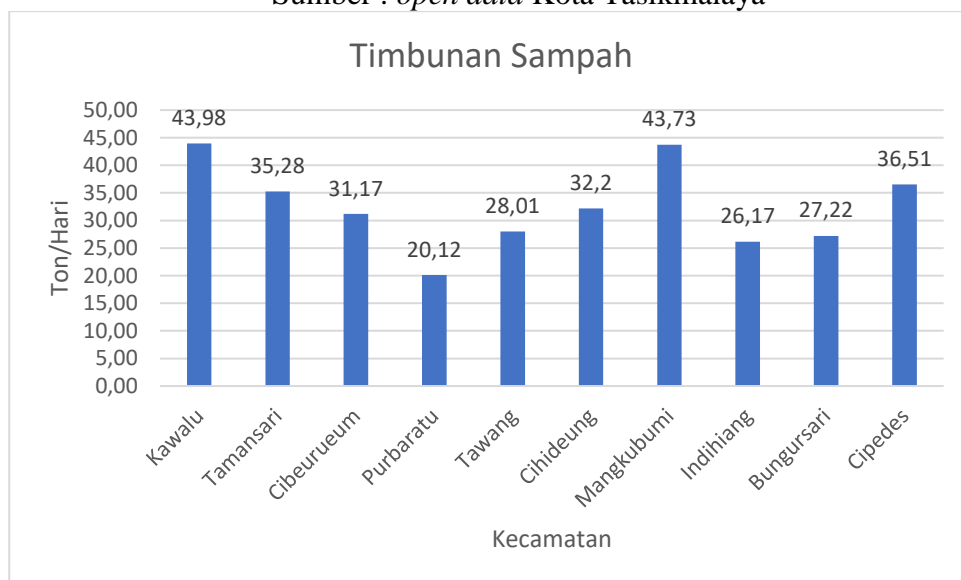
Permasalahan sampah sudah menjadi isu lingkungan yang cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan makhluk hidup. Pada dasarnya sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik yang sifatnya domestik ataupun industri yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari manusia (RI, 2008). Masyarakat, sebagai kelompok penghasil sampah terbesar sering kali menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, menghimpun data dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2022 rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0.7kg per hari. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan populasi manusia yang signifikan yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan hal

tersebut pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen dengan adanya target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di tingkat Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan istilah Kota Resik yang memiliki makna kota bersih dan rapi ternyata mengalami permasalahan serius terhadap isu lingkungan, salah satunya mengenai dampak lingkungan dari sampah. Berdasarkan data yang didapat dari laman resmi *open data* Kota Tasikmalaya (2022), pada tahun 2022 Kota Tasikmalaya menghasilkan timbunan sampah mencapai 324,39 Ton/hari. Berikut rincian data yang didapat dari laman resmi *open data* Kota Tasikmalaya :

Tabel: 1.1 Jumlah sampah Kecamatan Kota Tasikmalaya per hari pada 2022

Sumber : *open data* Kota Tasikmalaya



Timbunan sampah tersebut sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir sampah Ciangir atau yang dikenal dengan TPA Ciangir<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Dari total 324,39 ton sampah, sekitar 253,18 ton sampah yang berakhir di TPA Ciangir

TPA Ciangir merupakan tempat pembuangan akhir sampah bagi masyarakat Kota Tasikmalaya yang mulai beroperasi pada tahun 2002 dengan luas area sekitar 11 Hektar serta area penimbunan sekitar 5 Hektar yang berlokasi di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Pengelolaan sampah di TPA Ciangir menggunakan sistem *open dumping* dengan memanfaatkan area kosong untuk pembuangan sampah serta penumpukan sampah, yang berarti sampah yang diangkut dari area Kota Tasikmalaya menuju TPA Ciangir tidak melewati proses pemilihan dan pemilahan secara sistematis serta melakukan pembuangan tanpa adanya penutupan kembali terhadap pembuangan dan penumpukan sampah (Priatna,2019).

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan definisi dari pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (RI, 2008), lalu mengacu pada peraturan daerah, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menyatakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah terdapat dua bagian yaitu melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam pengurangan sampah terdapat metode 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang bertujuan untuk pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan sampah, serta dengan adanya pengurangan volume sampah yang meliputi

pengomposan sampah basah, daur ulang kertas, plastik, material dan sejenisnya, yang seluruhnya dikoordinasikan dengan OPD terkait. Selanjutnya dalam penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah (Tasikmalaya, 2012).

Realitanya pemilahan sampah di TPA Ciangir belum dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan, sebab pengelolaan sampah di TPA Ciangir dilakukan dengan cara manual terutama dalam pemisahan antara sampah organik dan anorganik, yaitu dengan tenaga manusia secara langsung, akibat belum adanya alat berat atau mesin yang mampu yang mengelola pemilahan sampah di TPA Ciangir. (Setiawatil, 2023)

Kondisi TPA Ciangir saat ini cukup mengkhawatirkan, berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya kemampuan dari TPA Ciangir hanya bisa menampung sebanyak 253 Ton sampah per hari. Hal ini masih jauh dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat kota Tasikmalaya yang mencapai 324,39 Ton/hari. Sehingga TPA Ciangir bisa dikatakan *overload* atau kelebihan muatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPA Ciangir. Selain itu pengelolaan sampah di TPA Ciangir terdapat kendala dalam pengadaan barang untuk sarana alat pengelolaan sampah yang masih belum merata, hal ini dikarenakan adanya beberapa alat pengelolaan sampah yang tidak ada, unitnya terbatas dan tidak layak pakai yang

diakibatkan dari minimnya dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah.<sup>2</sup>

Adanya keberadaan TPA Ciangir yang belum terkelola dengan cukup baik mengakibatkan masyarakat di sekitar TPA Ciangir terkena dampaknya yang berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun sosial, termasuk kondisi lingkungan yang tercemar. Tempat Pembuangan Akhir Ciangir dengan pengelolaan sampah tersebut apabila dilaksanakan secara terus menerus dengan jangka panjang, adanya TPA Ciangir mengakibatkan fenomena krisis lingkungan bahwa pencemaran sampah sangat mempengaruhi bukan hanya kenyamanan, tetapi kesehatan masyarakat, terutama di Kawasan TPA Ciangir (Cecep dan Irnawati,2018). Pada lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir adanya peningkatan limbah padat, rembesan air lindi yang berasal dari cairan zat sampah, polusi udara, serta kerusakan habitat alam, hal-hal tersebutlah yang memberikan dampak pada lingkungan yang berujung pada penurunan mutu kualitas lingkungan yang pada akhirnya terjadi permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, serta komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

---

<sup>2</sup> Data tersebut didapat dari pernyataan sekretaris DLH Kota Tasikmalaya pada saat rapat dengar pendapat Aktivis lingkungan, pemerintah kota bersama DPRD Kota Tasikmalaya, pada 09 Agustus 2023

sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan turunnya mutu kualitas lingkungan hidup sehingga melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (RI, 2009). Menurut Odum (1996) dalam (Reichenbach, 2019), pencemaran adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada sifat fisik, kimia dan biologi udara, tanah dan air, dimana perubahan tersebut terjadi menimbulkan kerugian bagi manusia dan berpengaruh terhadap sumber bahan mentah.

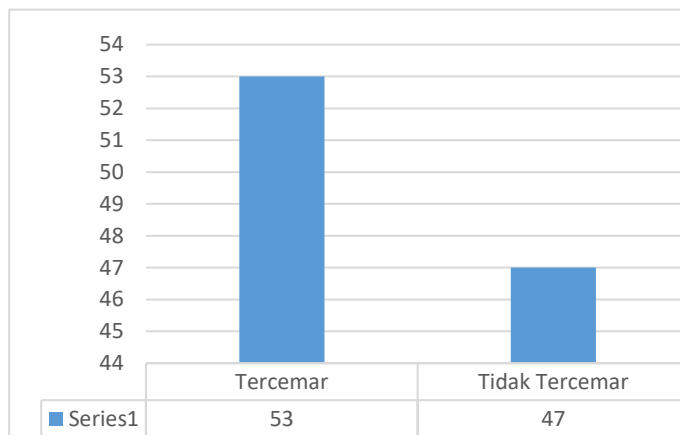
Mengutip dari *World Wildlife Fund, United Nations Environment Programme (2022)*, indikator krisis lingkungan yang disebabkan oleh sampah diantaranya meliputi: Peningkatan jumlah sampah, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia yang terancam. Berdasarkan indikator tersebut maka dapat diukur realitas yang terjadi dengan indikator-indikator tersebut.

Tabel 1.2 : Jumlah sampah yang masuk TPA Ciangir  
Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya



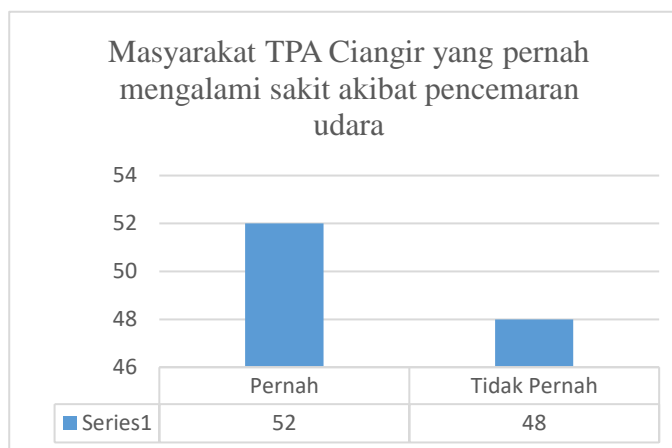
Tabel 1.3: Persentase Air Sumur yang Tercemar di Sekitar TPA Ciangir

Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Rusliana (2022)



Tabel 1.4: Persentase Masyarakat Sekitar TPA Ciangir yang Pernah Mengalami Sakit Akibat Pencemaran Udara

Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Rusliana (2022)



Pada tabel 1.2 berdasarkan data yang didapat dari Open Data Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, menjelaskan adanya peningkatan sampah yang masuk TPA Ciangir pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 60,27 Ton/hari, lalu pada tabel 1.3 dan tabel 1.4 penelitian yang dilakukan oleh Rusliana (2022) di Kampung Ciangir Desa Mugarsari, menemukan sebanyak 53% responden air sumur yang berada di sekitar TPA Ciangir tercemar, dan sebanyak 52%

responden mengaku pernah mengalami sakit akibat pencemaran udara. Berdasarkan hal tersebut jika mengacu pada *World Wildlife Fund, United Nations Environment Programme* mengenai indikator krisis lingkungan yang disebabkan oleh sampah, maka di sekitar kawasan TPA Ciangir adanya indikasi sebagai krisis lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, yang tentunya bakal berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem, pada akhirnya menjadi krisis lingkungan hidup, sehingga perlu adanya analisis lingkungan sebagai upaya dalam menekan terjadinya krisis lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lestari.

Politik lingkungan berpandangan bahwasanya kerusakan lingkungan atau alam bukan hanya diakibatkan oleh perilaku manusia yang melakukan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, akan tetapi dampak dari keberadaan manusia juga berpengaruh terhadap lingkungan, dengan adanya peningkatan pertumbuhan manusia berarti penumpukan bahaya yang mampu berakhir pada bencana (Dobson, 2007). Dengan begitu krisis lingkungan bisa terjadi melalui aktivitas atau kegiatan sehari-hari manusia, salah satunya yang diakibatkan sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah yang ditimbulkan menjadi persoalan publik sehingga perlu dikelola dengan tata kelola yang melibatkan pemerintah, pasar dan masyarakat. Namun demikian realitanya saat ini tata kelola sampah di Kota Tasikmalaya belum optimal sehingga terjadi krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir, hal tersebut juga belum banyak dijelaskan, serta menjadi isu lingkungan dalam penelitian ini.



Isu lingkungan sudah semestinya menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian lebih bagi pemerintah. Pada dasarnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan serta sebagai pembuat kebijakan memiliki kekuatan yang vital dalam penanggulangan isu lingkungan tersebut. Dengan regulasi, dan program yang menyertainya, seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan suatu permasalahan terutama yang menyangkut akan hajat hidup orang banyak, serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek ekologis sebagai bentuk langkah cermat dan efektif dalam membuat dan menjalankan regulasi, khususnya mengenai keberlangsungan lingkungan hidup yang didalamnya mengenai penanganan dan pengolahan sampah sangat perlu dilaksanakan sebaik mungkin, sebab adanya urgensi tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan TPA Ciangir. Sehingga perlu adanya kajian atau penelitian terkait adanya fenomena lingkungan di kawasan TPA Ciangir.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Cecep, Irnawati dkk (2018) yang menjelaskan mengenai pencemaran air di kawasan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Ciangir Kota Tasikmalaya, dalam penelitian tersebut sampah di TPA Ciangir dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk pencemaran air. Pencemaran air di TPA Ciangir disebabkan oleh limbah yang dihasilkan dari pembusukan sampah yang dikenal dengan air lindi (*leachate*) tidak tersaring dengan baik serta tempat

penampungan yang kurang layak sehingga mengakibatkan lahan pertanian warga sekitar rusak dan ikan menjadi berbau atau mati yang diakibatkan dari rembesan air lindi tersebut.

Penelitian yang dilakukan Sujianti, dkk (2020) yang menjelaskan mengenai pembangunan TPA Benowo oleh Pemerintah Kota Surabaya, dalam penelitian menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan TPA dalam mewujudkan pembangunan kawasan yang beraspek pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Pada awalnya keberadaan TPA Benowo memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan, namun demikian pemerintah melakukan tindakan revitalisasi dengan analisis aspek pembangunan berkelanjutan, dimulai dari adanya pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill*, mengubah gas metana menjadi energi listrik (PLTS), adanya pemberian sumber air PDAM untuk masyarakat sekitar kawasan, serta untuk polusi udara dilakukan penyemprotan setiap hari, sehingga bau dari sampah berangsur-angsur berkurang.

Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya serta dibersamai komitmen masyarakat menciptakan kondisi lingkungan sekitaran TPA Benowo yang baik dimulai dari adanya aliran air PDAM, jalan yang mulus, dan aroma pembuangan TPA mulai berkurang dikarenakan setiap hari Kawasan TPA Benowo diberi obat agar bau nya tidak menyengat sampai ke rumah warga yang ada disekitaran Benowo. Hal tersebut bisa dicapai dengan memprioritaskan aspek pembangunan keberlanjutan dengan landasan

lingkungan dan sosial, sehingga TPA Benowo dinobatkan menjadi salah satu pengelolaan TPA terbaik.

Penelitian yang dilakukan Hasiholan & Franklyn (2022) dengan judul “Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan” menjelaskan mengenai dampak etika lingkungan terhadap kerusakan lingkungan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan persoalan lingkungan dapat diselesaikan bukan hanya sekedar melalui gagasan etika lingkungan melalui pertimbangan moral yang seolah-olah berpihak dengan lingkungan, sebab pertimbangan moral tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan para pemangku kebijakan. Selama itu menguntungkan, apalagi tidak ada kekuatan melawan yang dapat menghentikannya, maka hal tersebut akan terus berlanjut, sekalipun membuat bumi tidak layak huni. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem kapitalisme dengan corak produksi dan konsumsinya yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Maka dari itu etika lingkungan tidak sekedar menjadi alat untuk mengaburkan kenyataan beserta permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.

Hasiholan & Franklyn (2022) menegaskan etika lingkungan sebagai analisis konkret penyebab sosial, ekonomi, dan politik dari kerusakan lingkungan untuk menunjukkan solusinya. Pandangan etika lingkungan bahwa masalah dan krisis lingkungan disebabkan oleh ide-ide yang salah dan pengambilan keputusan yang keliru terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga kita perlu melihat cara kerja dari sistem

ekonomi dan politik untuk menyelesaikannya persoalan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawatil dkk (2023) menjelaskan mengenai adaptasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk adaptasi dari masyarakat di sekitar TPA Ciangir terkait pencemaran lingkungan memiliki pola adaptasi pasif terhadap lingkungan alam. Masyarakat sekitar TPA Ciangir akan tetap bertahan di wilayah permukiman yang sekarang mereka tinggali meskipun lingkungan disekitarnya sudah tercemar oleh sampah yang menumpuk di TPA Ciangir, karena mereka tidak memiliki lahan permukiman yang lain, masyarakat yang sudah terbiasa mereka tidak melakukan upaya untuk memodifikasi rumah atau sejenisnya agar mengurangi polusi lingkungan yang masuk ke dalam rumah. Sikap pasrah masyarakat ini menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang tinggi karena faktor kemiskinan, penerimaan konsekuensi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji isu permasalahan lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan. Melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cecep & Irnawati (2018) dan Setiawatil, dkk (2023) menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir, lalu melalui penelitian Hasiholan & Franklyn (2022) menekan pentingnya politik lingkungan

melalui etika lingkungan sebagai instrumen dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, sehingga diharapkan melalui perspektif politik lingkungan, lingkungan daerah sekitar kawasan TPA Ciangir bisa berangsur-angsur lebih baik, tak menutup kemungkinan sebagaimana daerah kawasan TPA Benowo yang memiliki predikat yang terbaik dalam pengelolaan sampah.

Perspektif politik lingkungan diharapkan bisa memperoleh penjelasan pemerintah sebagai aktor utama berupaya untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk dalam isu pencemaran lingkungan yang terjadi pada sekitar kawasan TPA Ciangir. Sebab dengan politik lingkungan bisa menjadi ajang berbagai kepentingan, seperti industri, masyarakat sipil, dan kelompok lingkungan, berinteraksi dan berbenturan dengan memprioritaskan aspek-aspek ekologis lingkungan yang meliputi komponen abiotik sebagai perwujudan benda tak hidup (air, udara, tanah dan lainnya) serta komponen biotik sebagai perwujudan benda hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Namun demikian tingkat keberhasilan politik lingkungan bergantung pada sejauh mana pemerintah konsisten untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu untuk menguraikan secara lebih rinci dan jelas mengenai permasalahan yang diambil, penulis memilih judul *“Analisis krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan? ”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka adanya tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisa dan mendeskripsikan permasalahan lingkungan di sekitar TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan.”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Secara Teoritis**

1. Penelitian ini menggunakan Politik Lingkungan sebagai analisis dalam mengidentifikasi permasalahan lingkungan dengan persepektif etika lingkungan, diharapkan penelitian ini bisa mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan lingkungan di sekitar TPA Ciangir dalam perspektif etika lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan politik lingkungan melalui perspektif etika lingkungan sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya di sekitar daerah kawasan TPA Ciangir.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dalam suatu kawasan dan sekitar kawasan.
2. Penelitian ini mengidentifikasi persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan lingkungan sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan serta tindakan yang cermat dan tepat untuk keberlangsungan lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir.